

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Malang dilakukan sebelum menjadi *gemeente*, tercatat penyelenggaraan pendidikan di *Gemeente* Malang sudah ada sejak November 1851 dengan ditandai berdirinya sebuah sekolah tingkat dasar bernama *Gouvernements Lagere Scholen* (GLS).¹ Hadirnya GLS di *Afdeling* Malang dilatarbelakangi oleh sering tidak hadirnya murid dari Bangil dan Malang ke sekolah yang berada di pusat Kota Pasuruan. Alasannya adalah lokasi sekolah yang sangat jauh serta para orang tua murid enggan untuk mengirimkan anaknya ke Pasuruan. Kondisi pada saat itu juga sedang terjadi wabah kolera sehingga para orang tua tetap ingin bertemu dengan anak-anaknya. Kebiasaan orang Jawa pada abad ke-19 untuk tidak menjauhkan anak-anaknya yang belum dewasa kecuali dalam keadaan mendesak menjadi salah satu pertimbangan pendirian GLS di Malang.² Dalam hal ini, kondisi geografis serta kebiasaan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan pendirian sekolah di *Gemeente* Malang.

Hadirnya GLS di *Afdeling* Malang juga dilatarbelakangi oleh keinginan orang tua Belanda untuk pendidikan anak-anak Belanda. Pada masa kolonial Hindia

¹ Departement Van Onderwijs en Eeredienst, *Algemeene Verlag Staats van Het Schoolwezen in Nederlandsch Indie Afgesloten Onder Ultimo 1852* (Batavia: Landsdrukkerij, 1853).141.

² *Ibid.* 357-358.

Belanda perekonomian Malang mengalami perkembangan secara pesat, sehingga untuk menunjang aktivitas perekonomian maka kantor-kantor manajemen perkebunan didirikan di Malang dan pada saat yang bersamaan juga didirikan berbagai seperti pusat militer, perbankan, rumah sakit, pembangkit listrik dan sekolah.³ Sementara bagi pribumi, pendidikan kolonial hingga awal abad ke 20 belum terlalu diminati.⁴ Dalam hal ini Pemerintah Kolonial Hindia Belanda berusaha untuk mencari cara agar penduduk pribumi masuk ke dalam sistem pendidikan barat.

Pada tahun 1901, kebijakan politik etis di Hindia Belanda mulai berlaku. Politik etis adalah politik balas budi atas jasa rakyat Hindia Belanda terhadap kemakmuran Kerajaan Belanda, politik etis memiliki tiga program utama, yaitu: irigasi, emigrasi, dan edukasi.⁵ Pada masa politik etis pendidikan mengalami kemajuan pesat daripada abad ke 19, hal ini ditandai dengan dibukanya berbagai sekolah bergaya barat bermunculan baik yang ditujukan untuk orang Belanda dan Eropa maupun untuk orang Cina dan pribumi. Sekolah berbagai jenjang dari anak usia dini hingga menengah dibuka untuk menunjang kebutuhan pendidikan masyarakat, namun pendidikan kolonial pada dasarnya bersifat diskriminatif. Penyelenggaraan pendidikan dibagi berdasarkan tingkat kelas masyarakat atas yaitu

³ (Abubakar et al., 2020).5.

⁴ Zofrano Ibrahimsyah Magribi Sultani and Yasinta Putri Kristanti, "Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20," *Jurnal Artefak Vol* 7, no. 2 (2020).93.

⁵ Djohan Makmur et al., *Sejarah Pendidikan Di Indonesia Zaman Penjajahan*, 1993rd ed. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).23-28.

Belanda dan Eropa dan masyarakat kelas bawah yaitu Timur Asing (Arab, Cina, India) dan Pribumi. Kebijakan pemisahan kelas tersebut berlaku sejak 1893.⁶

Adanya *Staatsblad* No.125 tahun 1893 berpengaruh terhadap pendidikan pribumi. Pertama, Sekolah Dasar Kelas Satu diperuntukkan bagi anak-anak pribumi terkemuka atau kaya, sementara Sekolah Dasar Kelas Dua diperuntukkan bagi pribumi biasa. Pada awalnya yang membedakan antara Sekolah Dasar Kelas Satu dengan Sekolah Dasar Kelas Dua adalah kursus yang lebih Panjang, materi pelajaran yang lebih luas dan staf yang lebih kompeten, kemudian sejak 1907 Bahasa Belanda diberikan kepada Sekolah Dasar Kelas Satu.⁷

Sejak pertengahan abad ke-19 pendidikan untuk pribumi hanya ditujukan untuk mencetak pegawai administrasi berpangkat rendah.⁸ Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberlakukan pasal 181 Undang-undang Kolonial yang berisi perintah untuk mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi, hal tersebut membuktikan walaupun tujuannya adalah mencetak pegawai administrasi tingkat rendah. Komitmen untuk mendirikan sekolah bagi pribumi dibuktikan dengan membuka 250 sekolah baru bagi priayi serta pribumi sejak 1873 hingga 1882.⁹ Adanya kekuasaan serta dominasi yang kuat Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap pribumi menjadi faktor berhasilnya program tersebut.

Pendidikan menjadi prioritas dalam kebijakan politik etis karena tanpa adanya edukasi maka dua program politik etis lainnya, yakni irigasi dan emigrasi

⁶ Christiaan Lambert Maria Penders, "Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900-1942" (Australia National University, 1968).25.

⁷ K.F. Creutzberg and J Hardeman, *Het Onderwijs in Nederlandsch Indie* (Gravenhage: Landsdrukkerij Korthuis, 1916).19-20.

⁸ J.B. Walter, *Het Volksonderwijs in Nederlandch Indie* (Batavia: Groningen, 1932).12.

⁹ *Ibid.*13-14.

hasilnya kurang maksimal, sehingga pendidikan untuk pribumi dipandang perlu. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan agar pribumi lebih matang dalam hal administrasi, oleh sebab itu pendidikan berperan dalam tujuan politik etis sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan melalui emigrasi, transformasi dan irigasi. Alasan lainnya adalah agar nantinya para lulusan pribumi dapat ditempatkan di administrasi pemerintahan dengan gaji yang lebih murah daripada gaji orang Belanda maupun Eropa. Berlangsungnya politik etis berdampak baik terhadap pendidikan kolonial di Hindia Belanda daripada abad 18-19 M, pendidikan berorientasi barat lebih diperhatikan baik bagi kaum pribumi maupun Cina yang ada di Hindia Belanda.¹⁰

Pendidikan kolonial mengalami perkembangan yang signifikan setelah Malang mendapat status *gemeente* pada tahun 1914. *Gemeente* sendiri adalah wilayah setingkat kota yang memiliki struktur administrasi yang otonom.¹¹ Pemerintah *Gemeente* diberi tanggung jawab pengelolaan langsung baik personel maupun material, sekolah kelas dua (*Indlandsch Lager Onderwijs*), dan sekolah kota, selain itu pemerintah *gemeente* dan kabupaten juga diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi sekolah setempat.¹² Terkait dengan pendidikan kejuruan, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda akan menyambut baik jika pemerintah *gemeente* dan kabupaten dengan dewan daerah untuk mengambil tanggung jawab atas pendidikan kejuruan pada wilayah masing-masing, sementara

¹⁰ S Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, 2015 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2015). 16-18.

¹¹ Jujun Kurniawan, "Skripsi : Perkembangan Kota Malang 1914 – 1942 : Kajian Atas Intervensi Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda" (Universitas Gajah Mada, 2006). 7.

¹² Departement van Onderwijs en Eredienst, "Algemeen Verslag Van Het Middelbaar En Lager Onderwijs In Nederlandsche-Indie Over 1919" (Batavia: Landsdrukkerij, 1920). 2.

untuk pengelolaan sekolah tingkat menengah dan pendidikan tinggi masih dipegang oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (pemerintah pusat) demi menjaga kualitas pendidikan.¹³

Jenjang pendidikan kolonial di *Gemeente* Malang dibagi menjadi beberapa tingkatan, antara lain: pada tingkat dasar terdapat *Indlandsch Lager Onderwijs* atau sekolah dasar untuk pribumi dengan Bahasa Melayu sebagai pengantar yang terdiri dari: *Volkschool*, *Vervolgschool*, dan *Volledigescholen*, kemudian sekolah dasar dengan Bahasa Belanda sebagai pengantar atau *Westersch Lager Onderwijs*, terdiri dari: ELS, HIS, dan HCS. Pada tingkat kejuruan terdapat *Ambachtsleergang*, *Ambachtsschool*, *Cultuurschool*, *Huishoudschool* *Normaalcursussen*, *Normaalschool*, dan *Handelsschool*. Pada tingkat menengah pertama terdapat sekolah MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), dan pada tingkat atas terdapat HBS (*Hoogere Burgerschool*) dan AMS (*Algemeene Middelbare School*). Klasifikasi lainnya adalah berdasarkan kelas, yaitu sekolah Kelas Satu bagi anak-anak masyarakat Eropa serta priayi dan Kelas Dua bagi pribumi dan golongan masyarakat Timur Asing.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian diperlukan untuk memberikan dasar-dasar untuk menetapkan tujuan penelitian, sehingga dapat mengarahkan serta membimbing proses penelitian agar lebih terorganisir dan terarah. Rumusan masalah penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana

¹³ *Ibid.*3.

perkembangan pelaksanaan pendidikan kolonial di *Gemeente* Malang pada 1914-1942? Perkembangan pelaksanaan pendidikan kolonial di lingkungan *Gemeente* Malang merupakan pembahasan utama dalam penelitian ini. Pembagian periode pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: periode pertama adalah tahun 1914-1919, periode kedua adalah tahun 1919-1929, periode ketiga adalah tahun 1929-1933, periode keempat adalah tahun 1933-1936, dan periode kelima adalah tahun 1936-1942. Pembagian periode pembahasan didasarkan berdasarkan masa kepemimpinan wali kota *Gemeente* Malang selama 1914-1942.

Kedua, Apa saja lembaga pendidikan kolonial Hindia Belanda di *Gemeente* Malang selama 1914-1942? Sekolah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sekolah yang terdiri dari beberapa tingkat pendidikan, antara lain: pendidikan dasar yang dibagi menjadi: sekolah dasar dengan bahasa daerah (Bahasa Melayu) sebagai pengantar dan sekolah dengan Bahasa Belanda sebagai pengantar, selanjutnya MULO (setingkat SMP), pendidikan kejuruan, serta sekolah menengah tingkat atas, yang terdiri dari HBS dan AMS.

Ketiga, bagaimana dampak penyelenggaraan pendidikan pada *Gemeente* Malang pada tahun 1914-1942?, Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di *Gemeente* Malang tidak terlepas dari kontrol dari pemerintah Hindia Belanda karena penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari kepentingan penjajahan, pola pendidikan yang diskriminatif, dan sentralistik berpengaruh terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di *Gemeente* Malang, adanya pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap mobilitas sosial bagi masyarakat pribumi. Pada bagian ini juga membahas kebijakan-kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda yang menyangkut tentang pendidikan kolonial terutama bagi penduduk pribumi.

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian *Perkembangan Pendidikan Kolonial di Gemeente Malang 1914-1942* dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, analisa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kolonial di *Gemeente* malang pada 1914-1942. Pengaruh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap jalannya penyelenggaraan pendidikan, kepentingan penjajahan, kemudian pola pendidikan yang diskriminatif menjadi fokus pada bagian kedua. *Kedua*, menggali informasi tentang keberadaan Lembaga-lembaga pendidikan yang pernah ada di *Gemeente* Malang pada tingkat dasar, menengah dan kejuruan baik milik pemerintah maupun swasta. *Ketiga*, analisa terhadap dampak dari penyelenggaraan pendidikan kolonial di *Gemeente* Malang pada 1914-1942. Dalam bagian ini melibatkan perkembangan pendidikan yang ada di *Gemeente* Malang, perubahan kurikulum, serta dampak sosial dari segala kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Tujuan lainnya dari penelitian ini adalah menggali informasi tentang kesejarahan Kota Malang dari sisi pendidikan.

D. Metode penelitian

Penelitian tentang *Perkembangan Pendidikan Kolonial Di Gemeente Malang 1914-1942* merupakan sejarah sosial sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendapat Kuntowijoyo dalam meneliti sejarah yang memiliki konteks perubahan sosial, stratifikasi sosial serta mobilisasi sosial maka

konsep sosiologi merupakan konsep yang sangat berguna, karena hal tersebut merupakan spesialisasi dari sosiologi itu sendiri.¹⁴ Selanjutnya dalam penelitian menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yakni *heuristik*, *verifikasi*, *interpretasi*, dan *historiografi* (penulisan sejarah).¹⁵ Tahapan-tahapan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

Langkah pertama heuristik, yaitu upaya pengumpulan sumber data, dalam tahapan ini sumber data harus sesuai dengan jenis sejarah atau sesuai dengan topik yang diteliti.¹⁶ Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah sejumlah arsip pemerintahan Hindia Belanda antara lain: *Algemeene Verslag van den Staat van het Schoolwezen In Nedelansch-Indie* dan *Algemeene Verssrag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indie, Indie*, yang keduanya berisi tentang aturan-aturan pendidikan di Hindia Belanda. Sumber primer selanjutnya adalah *Staadsgemeente Malang Jaaverslag*, berisi laporan tahunan perkembangan *Gemeente* Malang selama satu tahun, dalam arsip tersebut terdapat laporan perkembangan pendidikan *Gemeente* Malang dalam jangka satu tahun pelajaran, dalam penelitian ini dari koran atau majalah yang sezaman juga menjadi sumber primer, untuk koran-koran yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: *De Indische courant*, *Bataviaasch nieuwsblad*, *De Indische courant*, *Soerabaijasch handelsblad* dan sebagainya. Sumber sekunder dalam penelitian ini didapat dari

¹⁴ Kuntowijoyo, *Penganatar Ilmu Sejarah* (Sleman: Tiara Wacana, 2013).65.

¹⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1975).32.; Kuntowijoyo, *Penganatar Ilmu Sejarah*.65

¹⁶ Warsino and Enda Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah : Dari Riset Hingga Penulisan* (Bantul: Pustaka Utama, 2018).18.

penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang kesejarahan kota Malang, diantaranya: *Kroniek Stadsgemeente Malang Over de Jaren 1914-1939* terbitan N.V. G. Kolff & Co, *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930* terbitan G. Kolff & Co, *Stadsgemeente Malang 14 April 1914-1934* terbitan G. Kolff & Co.

Langkah selanjutnya verifikasi, tahap ini adalah proses kritis terhadap sumber atau mencari keabsahan sumber. Verifikasi terdiri dari kritik ekstern (Autentisitas) dan kritik intern (Kredibilitas). Pada tahap verifikasi, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber data yang terdiri dari arsip, artikel koran serta majalah. Selanjutnya data dievaluasi terhadap kredibilitas sumber-sumber data dengan memperhatikan reputasi sumber, konteks sejarah serta potensi bias sejarah. Pada tahap Autentisitas, arsip-arsip seperti *Algemeene Verslag van den Staat van het Schoolwezen In Nedelansch-Indie*, *Algemeene Verssrag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch-Indie*, *Indie* dan *Staadsgemeente Malang Jaaverslag* kondisinya cukup baik, meskipun dalam beberapa Jilid buku sudah mulai lepas karena faktor usia. Selain itu beberapa buku sudah memiliki lubang-lubang kecil pada halamannya, namun seluruh tulisannya masih dapat dibaca.

Pada tahap Kredibilitas, analisis pemberitaan tentang pendidikan di *Gemeente* Malang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengkritisi sumber data lainnya. Misalnya dalam artikel koran berjudul “*De Soerabaiasche HBS*” yang diterbitkan oleh *Overijsselsch Dagblad* pada tahun 1919, yang memberitakan tentang rencana permohonan kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk mendirikan HBS di *Gemeente* Malang setelah keberhasilan pendirian MULO di

Gemeente Malang pada tahun 1916. Jika disandingkan dengan sumber data lainnya, yakni dalam *Staadsgemeente Malang Jaaverslag 1940* pendirian MULO sudah ada sejak 1912.¹⁷ Padahal dalam *Algemeen Verslag Van Het Onderwijs in Nederlandsh-Indie* 1912 yang terbit pada tahun 1915 belum terdapat tentang eksistensi MULO di *Gemeente* Malang. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka digunakan surat kabar yang terbit sezaman. Hal ini juga berlaku dalam pencarian sumber informasi lainnya, sehingga sebelum sumber data digunakan dalam penulisan, maka informasi yang diberikan harus memiliki kesamaan dengan sumber sezaman lainnya.

Langkah selanjutnya interpretasi, interpretasi terdiri dari dua metode yakni analisis dan sintesis, pada langkah analisis sejarah melakukan sintesis atas fakta-fakta yang telah didapatkan dari sumber data dan Bersama teori yang digunakan untuk menyusun fakta dalam interpretasi yang menyeluruh.¹⁸ Pada tahap interpretasi ini melibatkan pemahaman konteks ekonomi, sosial, politik dan budaya yang ada di *Gemeente* Malang pada 1914-1942. Selama tahap ini, temuan data-data dikumpulkan dari sumber data yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan kolonial di *Gemeente* Malang pada 1914-1942, selanjutnya data-data akan diuraikan kemudian akan menjadi fakta sejarah, fakta sejarah yang telah diperoleh kemudian di satukan atau dikelompokkan dengan menggunakan teori struktural-konflik.

¹⁷ “De Soerabaiasche H. B. S.,” *Overijsselsch Dagblad*, 1919.2; *Stadsgementee* Malang, *Staadsgemeente Malang Jaaverslag 1940*, 1941.91.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Penganatar Ilmu Sejarah*.65.

Langkah terakhir adalah historiografi, langkah ini merupakan Langkah terakhir dalam penulisan penelitian sejarah, dalam tahap ini hasil dari tahapan sebelumnya disusun secara analitis, kronologis dan sistematis dan juga berisi tentang jawaban atas masalah yang diajukan dalam penelitian. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka fokus penelitian ini adalah fakta hubungan sosial dan fakta benda yang tidak tersentuh oleh penelitian kuantitatif.¹⁹ Kemudian, hasil penelitian tentang *Perkembangan Pendidikan Kolonial di Gemeente Malang 1914-1942* disajikan dalam bentuk kronologis.

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah *Gemeente* Malang. Aspek temporal dalam penelitian ini adalah 1914-1942, batasan dimulai pada 1914 karena pemerintah *gemeente* memiliki kewenangan untuk membuat regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan pada tingkat lokal hingga berakhir pada 1942, hal ini karena pemerintahan *Gemeente* Malang berakhir yang disebabkan oleh pendudukan Jepang di Malang. Jepang mengeluarkan kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk menghapus pengaruh Belanda, akibatnya banyak sekolah baik milik pribumi atau negeri yang ada sebelumnya ditutup oleh Jepang.²⁰ Atas kebijakan Jepang tersebut secara otomatis mengakhiri pendidikan kolonial di *Gemeente* Malang.

¹⁹ Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Yogyakarta: Pen erbit Ombak, 2012).79.

²⁰ Resiani Melinda, "Kebijakan Jepang Dalam Sistem Pendidikan Dan Pengajaran Di Pakualaman Tahun 1942-1945," *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah 2018*, 2018, 1–15.5.